

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu Negara, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan kelebihan dananya tersebut di bank dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) yang meminjam dana ke bank. Fungsi intermediasi ini akan berjalan dengan baik apabila surplus unit dan defisit unit memiliki kepercayaan terhadap bank. Berjalannya fungsi intermediasi suatu perbankan akan meningkatkan penggunaan dana. Dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan ke masyarakat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif. Aktivitas produktif ini yang kemudian akan meningkatkan output dan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perbankan merupakan tonggak utama dalam pengukuran pertumbuhan suatu Negara. Di Indonesia, perbankan digolongkan menjadi dua, yakni bank umum konvensional dan bank umum syariah. Sejarah perbankan di Indonesia memperlihatkan bahwa bank konvensional jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan bank syariah yang baru ada di tahun 1992. Dengan waktu yang lebih lama itulah

bank konvensional menguasai pasar perbankan nasional dengan jumlah bank yang sudah banyak. Namun seiring dengan perkembangan dunia perbankan dan adanya kebutuhan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang berdasarkan syariat islam yakni dengan prinsip bagi hasil, maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2009 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan tersebutlah yang dijadikan dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia.

Pasca krisis, perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendirian bank syariah ataupun lokus bank konvensional yang memberikan pelayanan syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2010 tentang Bank Indonesia, telah memberikan peluang yang besar bagi perbankan konvensional dalam memberikan layanan syariah sebagai wujud pengelolaan dual banking sistem dengan mendirikan lokus berupa Unit Usaha Syariah (UUS), disamping itu juga berdiri Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Asma Nurulaini : 2014)

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu yang mendasari seluruh kinerja sebuah perusahaan. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat melakukan pengukuran efisiensi, pihak bank dihadapkan pada suatu kondisi bagaimana cara mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada. Dengan diidentifikasi alokasi input dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisienan (Suseno, 2008:34)

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 tentang haramnya bunga bank yang dianggap sama dengan riba juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah. Ini dikarena jumlah masyarakat Indonesia mayoritas Islam, dimana pada tahun 2010 jumlah umat muslim di Indonesia berjumlah 207 juta jiwa, atau 87% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010).

Larangan riba terdapat dibeberapa firman Allah S.W.T dan hadits – hadits Rasulullah S.A.W. Salah satu firman Allah S.W.T yang melarang tentang riba terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3) : 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dalam skala mikro salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami pertumbuhan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdirinya BPRS sendiri dilatar belakangi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami restrukturisasi. Restrukturisasi perekonomian di Indonesia ini berupa lahirnya berbagai kebijakan, salah satunya dalam bidang perbankan yang kemudian lahirlah BPRS (Djazuli dan Yadi Janwari, 2002: 108).

Keberadaan BPRS memiliki tujuan khusus, yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, dan usaha kecil dan menengah (UKM) baik diperkotaan maupun dipedesaan. Secara umum, BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya. LKM memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai sekaligus, yaitu komersial dan pengembangan (Muhari dan Hosen, 2014: 307).

UKM merupakan sektor yang potensial untuk penyaluran pembiayaan bagi BPRS, karena UKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia dimana unit usaha UKM merupakan 99,9% dari total usaha di Indonesia serta menyerap 77,67 juta tenaga kerja atau 96,8% dari tenaga kerja nasional, dengan sumbangan

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,5% (Hartono, 2008: 52).

Data Statistik Perbankan Syariah pada bulan Oktober 2013 menyatakan bahwa total aset seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia bernilai Rp 5 triliun atau hanya 2.5% dari keseluruhan total aset perbankan syariah Indonesia yang telah mencapai 235 triliun rupiah. Nilai tersebut tentunya masih rendah jika total aset BPRS tersebut dibandingkan dengan keseluruhan total aset perbankan syariah. Kontribusi BPRS tersebut menjadi nilai yang sangat kecil jika dibandingkan terhadap perbankan nasional, mengingat komposisi aset perbankan syariah Indonesia hanya sebesar 4.88% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Perkembangan BPRS perlu ditingkatkan dikarenakan peran BPRS yang begitu penting terhadap pertumbuhan unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan objek pembiayaan BPRS untuk menggerakkan perekonomian sektor riil. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS adalah salah satu sumber modal bagi UMKM yang jumlahnya pada tahun 2012 menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencapai 55.2 juta unit usaha atau memiliki proporsi sebesar 99.99% dari keseluruhan jenis unit usaha di Indonesia. Pertumbuhan BPRS dari segi aset atau jumlahnya tentunya mempengaruhi perkembangan UMKM yang masih menjadi unit usaha penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, sebesar 97.24 dari pangsa pasar tenaga kerja. Sehingga, kinerja BPRS perlu diperhatikan

dan ditingkatkan untuk mendukung perkembangan ekonomi sektor riil melalui UMKM (Ahmad Fauzi : 2014)

Keberadaan BPRS yang merupakan bagian perbankan, khususnya perbankan syariah, tentunya memberi andil yang cukup berarti dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. BPRS di Indonesia sendiri 2 mengalami perkembangan yang cukup baik, dari segi total pembiayaan, total DPK, dan jumlah BPRS yang ada di Indonesia sampai saat ini. Pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013, perkembangan total pembiayaan yang diberikan BPRS rata-rata meningkat sebesar 28% setiap tahunnya dan dana pihak ketiga (DPK) yang mampu dihimpun BPRS rata-rata meningkat sebesar 29% setiap tahunnya (Statistik Perbankan Syariah 2013) .

Meningkatnya jumlah bank syariah menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan antara sesama bank syariah dan juga bank konvensional. Sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing bank syariah. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perbankan syariah diantaranya adalah efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan pengukuran kinerja operasional bank syariah dan mengarahkannya kepada kinerja yang lebih efisien (Sumitra : 2010)

Penelitian mengenai efisiensi khususnya dengan pendekatan frontier pada perbankan dimulai oleh Sherman dan Gold pada tahun

1985. Mereka mengaplikasikan pendekatan frontier pada industri perbankan dengan fokus pada pengukuran efisiensi operasional simpan pinjam bank. Sejak saat itu, banyak penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan frontier untuk mengukur efisiensi perbankan. Secara umum, penelitian efisiensi perbankan membedakan dua tipe efisiensi, yaitu scale efficiency dan Xefficiency. Konsep scale efficiency pertama kali dikenalkan oleh Farrell (1957), yang dapat didefinisikan sebagai hubungan antara rata-rata biaya produksi per unit bank dan volume, dan dengan demikian bank dikatakan memiliki economic of scale ketika output meningkat diikuti dengan turunnya biaya unit produksi. Kedua, X efficiency. Menunjukkan kepada penyimpangan dari costefficient frontier yang menggambarkan biaya produksi terendah untuk tingkat output tertentu. X-efficiency adalah akar dari technical efficiency, yang mengukur derajat pergeseran dan sisa pada proses produksi, dan allocative efficiency yang mengukur macam-macam tingkat input (Rafika Rahmawati : 2016)

Efisiensi terjadi jika:

- (1) Pemakaian input yang sama menghasilkan output yang lebih banyak.
- (2) Pemakaian input yang lebih sedikit menghasilkan output yang sama.

- (3) Pemakaian input yang lebih banyak menghasilkan output yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan input yang digunakan (Hidayat : 2008).

Efisiensi merupakan jawaban atas kesulitan dalam menghitung ukuran kinerja seperti tingkat efisiensi alokasi, teknis maupun efisiensi ekonomi. Efisiensi teknis adalah kombinasi antara kapasitas dan kemampuan unit ekonomi memproduksi sejumlah output dari sejumlah input yang ada beserta teknologi. Sedangkan efisiensi ekonomi merupakan penjumlahan dari efisiensi alokasi dan efisiensi teknis (Tanjung dan Devi 2013).

Dengan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi BPRS menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Terutama efisiensi terkait fungsi bank sebagai lembaga Intermediasi. Fungsi ini berkaitan dengan pemberian fasilitas atau kemudahan mengenai aliran dana dari mereka yang kelebihan dana kepada mereka yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan dalam fungsi ini adalah sebagai *broker*, pialang atau *dealer* yang berperan meningkatkan efisiensi pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang mempunyai kelebihan dana disebut sebagai pihak penyimpan (*saver*) dan pihak yang membutuhkan dana disebut sebagai pihak peminjam (*borrower*) (Komaryatin, 2007: 102).

Pengukuran efisiensi teknik yang menggunakan multi input dan output ini diharapkan dapat mengukur efisiensi fungsi intermediasi

BPRS di Surakarta pada periode 2016. Dan dengan ini diharapkan dapat ditemukan faktor penyebab inefisiensi BPRS, sehingga dapat dilakukan kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja BPRS yang tidak efisien di Surakarta.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa skripsi yang ditulis dengan judul “ANALISIS TINGKAT EFISIENSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI KOTA SURAKARTA MENGGUNAKAN DATA DEVELOPMENT ANALYSIS (DEA) PERIODE 2016” diharapkan dapat mengukur tingkat efisiensi yang terjadi terhadap BPRS khususnya di Kota Surakarta sehingga dapat membantu untuk mengukur kebijakan tingkat efisien tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan UKM (usaha kecil dan menengah) harus memiliki kinerja yang efisien agar dapat bertahan di industri keuangan, karena BPRS harus bersaing dengan bank-bank umum yang mulai mengincar pasar UKM yang selama ini menjadi target pasar BPRS.

Untuk itu penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengetahui tingkat efisiensi fungsi intermediasi BPRS di Surakarta pada periode 2016.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisisensi BPRS di Surakarta, dan menentukan BPRS mana yang efisien dan yang tidak efisien pada periode 2016.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pemerintah dan Bank Indonesia

Diharapkan dapat menjadi alat informasi dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan perbankan dalam meningkatkan efisiensi BPRS agar tercapai stabilitas ekonomi nasional.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Diharapkan dapat menjadi pedoman penilaian kinerja BPRS di Surakarta sehingga dapat dijadikan pertimbangan pengambilan kebijakan koreksi untuk meningkatkan kinerja bank tersebut.

3. Bagi penelitian berikutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

E. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data *time series* dan menggunakan data kuartal yaitu dari Januari 2016 – Desember 2016. Data tersebut diperoleh dari instansi-instansi pemerintah yang terkait antara lain dari *website* resmi Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari BPRS yang memiliki laporan keuangan pada tahun 2016 yaitu berjumlah 8 BPRS.

Dalam penelitian ini, pengukuran efisiensi BPRS di Surakarta akan diukur dengan DEA (*Data Envelopment Analysis*) dengan menggunakan pendekatan *input oriented*, dan menggunakan pendekatan CRS (*Constant Return to Scale*). DEA adalah sebuah metode *frontier non parametric* yang menggunakan program linier untuk membandingkan rasio output dan input untuk semua unit yang dapat dibandingkan dalam sebuah populasi. Tujuan metode DEA adalah sebagai alat untuk membantu dalam evaluasi tingkat efisiensi dari *decision making unit* (DMU) (Fathony, 2012: 227).

Model CCR merupakan model yang paling sering digunakan, yang dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978 dengan menerapkan *constant return to scale* (CRS). Rumus dari model dapat ditulis sebagai berikut (Komariyatin, 2007: 107-108):

$$maks : h_o = \frac{\sum_{r=1}^s U_r Y_{rjo}}{\sum_{i=1}^m V_i X_{ijo}}, j = 1, 2, jo, ..n$$

Dimana:

ho : efisiensi masing-masing BPRS

s : jumlah output BPRS yang di amati

m : jumlah input BPRS yang diamati

yrj : jumlah ouput i yang digunakan masing-masing BPRS

xij : jumlah input j yang digunakan masing-masing BPRS

u_r : bobot output i yang dihasilkan per BPRS

v_i : bobot input j yang diberikan per BPRS

Kendala:

$$kendala = \frac{\sum_{r=1}^s U_r Y_{rj}}{\sum_{i=1}^m V_i X_{ij}} \leq 1; \text{ untuk setiap unit } j$$

$$V_i, U_r \geq 0$$

untuk $r = 1, N$

Dimana N menunjukkan jumlah bank dan sample, Angka rasio efisiensi relatif berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau 0 sampai 100%. Suatu DMU memiliki kinerja yang efisien jika nilai efisiensi relatif sebesar 1 atau 100% sedangkan DMU lain yang nilainya dibawah 1 atau 100% maka kemampuannya masih dibawah DMU yang telah efisien.

Adapun dalam penelitian ini, variabel yang digunakan sebagai input adalah tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Sedangkan variabel output yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, piutang murabahah dan penempatan pada bank lain.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori tentang BPRS, efisiensi, dan *Data Envelopment Analysis* (DEA) sebagai dasar penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan referensi bagi peneliti. Dijelaskan pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang diambil oleh peneliti.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, definisi variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Menguraikan tentang deskripsi pengolahan data dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA), pembahasan dan hasil analisis tentang seberapa efisien masing-masing BPRS dan menentukan BPRS mana yang efisien dan yang tidak efisien di Jawa Tengah serta kebijakan apa yang harus dilakukan agar BPRS yang tidak efisien menjadi efisien.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.